

PENETAPAN WFH

2021

Kpt 7/SDM.07.1-Kpt/2103/KPU-Kab/VI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR 7/SDM.07.1-Kpt/2103/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN *WORK FROM HOME (WFH)* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

ABSTRAK:

- Menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 583/SDM.07.1-SD/05/KPU/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di Kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa pandemi dan merespon kondisi Kantor KPU Kabupaten Natuna yang saat ini 2 (dua) orang staf terpapar Corona Virus Disease (COVID 19);
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.7/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.IV/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna ini menetapkan *Work From Home (WFH)* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna mulai tanggal 1 s/d 14 Juli 2021 dengan ketentuan Jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) sebanyak 50% (lima puluh persen) dan Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan Lembaga, Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang sedang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal masing-masing (*Work From Home*) dapat diminta kehadirannya untuk bekerja di kantor atas arahan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2021